

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 60 TAHUN 2023
TENTANG : BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO,
ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR,
SERTA RUMAH PEKERJA YANG
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

BATASAN HARGA JUAL RUMAH UMUM DAN RUMAH PEKERJA
YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

No	Zona	2023	Mulai 2024
1.	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai)	Rp162.000.000,00	Rp166.000.000,00
2.	Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu)	Rp177.000.000,00	Rp182.000.000,00
3.	Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas)	Rp168.000.000,00	Rp173.000.000,00
4.	Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu	Rp181.000.000,00	Rp185.000.000,00
5.	Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya	Rp234.000.000,00	Rp240.000.000,00

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BERMETERAI DARI PEMBERI KERJA MENGENAI BESARNYA PENGHASILAN

SURAT KETERANGAN DARI PEMBERI KERJA MENGENAI BESARNYA PENGHASILAN

Yang menandatangani surat keterangan ini:

nama :(1)
jabatan :(2)
nama instansi/perusahaan :(3)
nomor pokok wajib pajak/
nomor induk kependudukan :(4)

bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari
nama :(5)
nomor induk kependudukan/
nomor pokok wajib pajak :(6)

dengan ini memberikan keterangan bahwa penghasilan yang diterima oleh Saudara(7)
adalah sebesar Rp.....(8) setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karyawan
meterai

(tempat), (tanggal)...(9)
Yang memberikan keterangan,

(nama).....(10)

(nama).....(11)
(jabatan).....(12)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA

- (1) Diisi dengan nama pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.
- (2) Diisi dengan jabatan pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.
- (3) Diisi dengan nama instansi atau perusahaan pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.
- (4) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pemberi kerja, bendaharawan gaji atau yang setara dalam hal pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara tidak memiliki nomor pokok wajib pajak.
- (5) Diisi dengan nama lengkap dan jelas karyawan.
- (6) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak karyawan.
- (7) Diisi dengan nama lengkap dan jelas karyawan penerima penghasilan.
- (8) Diisi dengan jumlah penghasilan karyawan per bulan.
- (9) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (10) Diisi nama lengkap dan jelas karyawan.
- (11) Diisi dengan nama lengkap dan jelas pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.
- (12) Diisi dengan jabatan pemberi kerja, bendaharawan gaji, atau yang setara.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN (PEMBELI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS)

SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN ATAS KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :(1)
nomor induk kependudukan /
nomor pokok wajib pajak :(2)
pekerjaan :(3)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang saya terima dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebesar Rp.....(4) setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

(tempat), (tanggal)...(5)
Yang menyatakan,

meterai

(nama)...(6)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

- (1) Diisi dengan nama pihak yang akan memperoleh rumah umum.
- (2) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak pihak yang akan memperoleh rumah umum.
- (3) Diisi dengan pekerjaan pihak yang akan memperoleh rumah umum seperti usaha ternak, pedagang, dan lainnya.
- (4) Diisi dengan jumlah penghasilan pihak yang akan memperoleh rumah umum.
- (5) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (6) Diisi dengan nama lengkap dan jelas pihak yang akan memperoleh rumah umum.

C. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS DIBEBASKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA RUMAH PEKERJA

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS DALAM RANGKA PEMANFAATAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA RUMAH PEKERJA

Nomor:.....(1)

Telah diterima pemberitahuan pemanfaatan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas penyerahan(2)

dari pihak yang akan memperoleh rumah dengan identitas sebagai berikut:

nama :(3)

nomor induk kependudukan/
nomor pokok wajib pajak :(4)

.....(5)



.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT TANDA TERIMA ELEKTRONIK
PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS DIBEBASKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO,
ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA RUMAH PEKERJA

- (1) Diisi nomor tanda terima yang diterbitkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 - (2) Diisi dengan nama objek yang akan diberikan fasilitas dibebaskan pajak pertambahan nilai (Rumah Umum/Pondok Boro/Asrama Mahasiswa/Rumah Pekerja).
 - (3) Diisi nama pihak yang akan memperoleh (Rumah Umum/Pondok Boro/Asrama Mahasiswa/Rumah Pekerja).
 - (4) Diisi nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pihak yang akan memperoleh (Rumah Umum/Pondok Boro/Asrama Mahasiswa/Rumah Pekerja).
 - (5) Diisi tempat dan tanggal tanda terima diberikan.
 - (6) Diisi nama dan jabatan kepala kantor pelayanan pajak tempat pihak yang akan memperoleh rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa atau rumah pekerja.
- Untuk perolehan rumah yang mana pihak yang akan memperoleh tidak memiliki nomor pokok wajib pajak diisi nama dan jabatan kepala kantor pelayanan pajak pengusaha kena pajak terdaftar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 198501162010122002